

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/mwyvf952>

ANALISIS KERJASAMA AFTA DAN INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN

Irsya Tursina Putri¹

Fakultas Ilmu Sosial Dan Kependidikan, Universitas Potensi Utama ¹

email korespondensi: resitaka@uty.ac.id

ABSTRAK

AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan sebuah daerah perdagangan bebas antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. AFTA dibentuk pada Januari 1992 dan resmi dijalankan pada tahun 1993. AFTA ditujukan untuk mengembangkan potensi serta kekuatan ekonomi ASEAN yang masih terdapat banyak negara berkembang. AFTA sendiri berfungsi untuk meningkatkan arus investasi, arus tenaga kerja dan arus pertukaran informasi dan teknologi antara negara maju dan negara berkembang yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran AFTA diharapkan dapat memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki oleh tiap negara yang tergabung dalam ASEAN. Namun AFTA yang dibentuk oleh ASEAN tersebut juga mengalami beberapa kendala pada masa sekarang. Salah satu kendala yang terbesar adalah adanya pandemi Covid-19. Selain daripada hal tersebut, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat turut membawa pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan AFTA sebagai daerah perdagangan bebas. Pada pembahasan kali ini, penulis akan membahas mengenai tantangan serta peluang yang dihadapi oleh AFTA dan juga Indonesia selaku salah satu negara anggota yang terlibat secara aktif baik di ASEAN sendiri maupun di AFTA dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2015-2020. Penulis menggunakan metode deskriptif analitik atau Explanatory Research.

Keywords: AFTA, Perdagangan Bebas, Indonesia, ASEAN, Asia Tenggara

1. PENDAHULUAN

Liberalisme merupakan salah satu teori atau perspektif dalam Ilmu Hubungan Internasional. Teori ini mengandung pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis studi kasus dalam hubungan internasional. Dengan kata lain ini adalah metode yang dapat digunakan untuk melihat jika peluang dan kerjasama AFTA (*ASEAN Free Trade Agreement*) di tahun 2015 hingga tahun 2020. Secara istilah, liberalisme merupakan salah satu ideologi dalam HI yang mengutamakan kerjasama dan persahabatan dengan negara lain. Asumsi liberalisme adalah bahwasannya manusia merupakan makhluk yang baik dan rasional. Oleh karena kedua sifat tersebut, maka manusia akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan di tiap interaksi yang dilakukannya dengan manusia lainnya pula.

Liberalisme merupakan ideologi yang muncul akibat trauma perang yang terjadi pada masa modern. Perang dianggap sebagai salah satu instrumen atau alat yang menghancurkan peradaban manusia, sehingga manusia tidak dapat lagi hidup secara damai dan tentram. Akibat adanya hal tersebut, maka pada akhir Perang Dunia I[3], presiden dari Amerika Serikat memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi internasional atau LBB atau Liga Bangsa-Bangsa yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perang kembali di dunia internasional. Namun, usaha yang dilakukan oleh presiden Amerika Serikat tersebut untuk mencegah kembalinya perang menemui sebuah kegagalan.

Perang kembali meletus pada tahun 1939 dan Liga Bangsa Bangsa selaku organisasi internasional dan sebagai salah satu perwujudan dari perspektif liberalisme dalam HI mengalami sebuah kegagalan. Ideologi liberalisme dari awal sampai akhir Perang Dunia II dan Perang Dingin mengalami kemunduran yang berarti, sehingga tidak terlalu mendapatkan perhatian oleh para ahli pada masa itu. Namun liberalisme kembali mendapatkan perhatiannya di saat gelombang demokrasi menyebar di seluruh dunia. Adanya gelombang demokrasi tersebut tentu menuntut adanya asas keterbukaan dan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia.

Kemudian paradigma Ilmu HI yang dulunya dikuasai oleh realisme, kemudian tergantikan oleh liberalisme, yang dipandang sebagai sudut pandang yang lebih bersahabat dan dapat menciptakan tempat yang lebih baik untuk umat manusia. Liberalisme menganggap bahwasannya hubungan internasional merupakan salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan negara. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, maka negara-negara disarankan untuk menjaga hubungan baik dengan aktor rasional lainnya sembari mengejar keuntungan sebesar-besarnya dari adanya hubungan internasional yang dilakukan oleh negara-negara tersebut.

Berbeda dengan anggapan realisme yang menganggap bahwa dunia internasional merupakan suatu sistem yang anarkis yang di dalamnya negara-negara bebas bertindak demi bertahan hidup, walaupun merugikan atau menjatuhkan negara lain, maka liberalisme menganggap bahwa negara lain merupakan salah satu aktor rasional yang dapat dimanfaatkan untuk saling membantu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari masing-masing negara. Liberalisme merupakan salah satu perspektif klasik dalam HI bersamaan dengan Realisme yang juga salah satu perspektif klasik.

Dapat dikatakan bahwa liberalisme dalam HI merupakan salah satu perspektif klasik dalam HI yang menekankan hubungan yang baik serta bersahabat dengan negara-negara lain. Aktor-aktor dalam HI dianggap sebagai aktor-aktor yang memiliki sifat yang baik dan juga rasional, sehingga tidak akan pernah diragukan bahwasannya setiap aktor akan mengejar keuntungan tersendiri dengan melakukan interaksi dengan aktor lainnya pula.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik atau Explanatory Research. Penelitian ini akan berfokus kepada objek-objek penelitian yang terdapat dalam tulisan ini dan menjelaskan segala fenomena yang terjadi secara analitis dan deskriptif. Pendekatan atau perspektif yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan liberalisme. Pendekatan tersebut akan menjelaskan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh AFTA dan Indonesia selaku salah satu anggota yang tergabung dalam AFTA terutama mengenai kerjasama dan hubungan antara Indonesia dan juga AFTA sebagai salah satu instrumen pemenuhan kebutuhan Indonesia dalam hubungan internasional. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari tahun 2015-2020.

3. TINJAUAN LITERATUR

3.1. FREE TRADE AREA

Free Trade Area atau daerah perdagangan bebas merupakan sebuah daerah yang dibentuk secara khusus oleh aktor negara dalam rangka pengurangan atau peniadaan tarif[4]. Perdagangan bebas yang dimaksud merupakan sebuah jenis perdagangan internasional dalam suatu wilayah tertentu yang disepakati secara politis maupun ekonomi oleh dua negara atau lebih dalam rangka meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut.

Hambatan yang dimaksud adalah hambatan tarif dan non-tarif [4]. Hambatan tarif berupa pajak masuk barang ke dalam suatu negara dan lain sebagainya. Pajak tersebut dikenakan sebagai salah satu pemasukan dari suatu negara dan sebagai salah satu cara untuk melindungi industri lokal. Hambatan jenis kedua adalah hambatan non-tarif. Hambatan tersebut merupakan hambatan yang berupa kuota, perlengkapan dan jaminan kesehatan yang disusun berdasarkan standarisasi negara tertentu dan lain sebagainya. Kedua hambatan tersebut dalam konteks perdagangan bebas tentu dikurangi atau dalam keadaan tertentu ditiadakan agar mempermudah akses masuk barang-barang yang berasal dari negara-negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut.

Selain dari pada mempermudah akses impor dan ekspor, adanya perdagangan bebas akan mempermudah akses investasi ke dalam negara-negara yang terlibat dalam perdagangan bebas tersebut. Hal tersebut tentu sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Adam Smith bahwasannya liberalisasi perdagangan akan membawa investasi yang besar dan investasi yang besar akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara[5]. Free Trade Area merupakan salah satu perwujudan dari liberalisasi perdagangan yang memberikan akses sebesar-besarnya kepada pelaku ekonomi untuk mengembangkan potensi diri mereka dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang sudah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya.

Dapat dikatakan bahwasannya perdagangan bebas merupakan salah satu dari perwujudan liberalisasi perdagangan yang ditujukan sebagai katalisator pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari negara-negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut. Selain mengurangi atau bahkan meniadakan hambatan tarif dan non tarif antara negara-negara yang terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut, adanya daerah perdagangan bebas tersebut akan memicu dan mempermudah investor dari luar negeri untuk berinvestasi dengan negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas. Adanya investasi asing yang masuk ke dalam suatu negara akan memberikan dorongan yang kuat dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari suatu negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi regional yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand[6]. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang memiliki 10 negara sebagai anggotanya[7]. Salah satu dari anggota tersebut adalah Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara pendiri dan negara anggota dari ASEAN. ASEAN didirikan sebagai salah satu usaha untuk mempererat persahabatan dan menjaga hubungan baik dari negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara.

Salah satu faktor yang mempererat dan yang berkontribusi terhadap pendirian organisasi regional tersebut adalah negara-negara di ASEAN memiliki kesamaan budaya. Hal tersebut dapat dicontohkan seperti negara Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan juga Filipina yang masih merupakan negara serumpun. Selain daripada faktor kebudayaan yang menjadi salah satu hal yang memperkokoh persahabatan antara negara-negara di ASEAN, faktor sejarah menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi dalam pembentukan ASEAN. Hal tersebut disebabkan adanya persamaan fakta bahwa wilayah Asia Tenggara dulunya merupakan jajahan bangsa barat, seperti Malaysia, Indonesia, Filipina dan lain sebagainya. Oleh karena fakta dan sejarah tersebut, ASEAN dibentuk guna mencegah terjadinya aktor asing masuk dan menguasai wilayah ASEAN tersebut.

ASEAN didirikan atas prinsip non-intervensi[8]. Hal tersebut berarti masing-masing negara yang tergabung dalam ASEAN tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan dalam negeri masing-masing dari anggota ASEAN. Lain kata, kedaulatan masing-masing negara tidak boleh dicampuri oleh negara lain, walaupun negara tersebut terletak pada kawasan dan bergabung dengan ASEAN juga. Hal tersebut di lain sisi dapat menjadi sebuah kelemahan dan kekuatan bagi ASEAN.

Di satu sisi, negara-negara dapat bebas membuat kebijakan mengenai hal-hal yang dipandang krusial bagi kehidupan suatu negara. Hal tersebut dapat menjadi salah satu alat untuk mempertahankan kehidupan suatu negara dan menjadikan negara-negara di ASEAN mandiri, tanpa menggantungkan hidupnya kepada panduan yang dikeluarkan secara bersama dengan negara lain. Di lain sisi, adanya prinsip non intervensi, juga menjadi salah satu kelemahan ASEAN, yang mana kebijakan yang dikeluarkan negara-negara di ASEAN tidak akan pernah tersusun secara koordinatif. Hal tersebut karena negara lain atau bahkan organisasi regional tersebut tidak memiliki hak untuk mencampuri kedaulatan dari negara lain.

Organisasi regional ASEAN tentu memiliki bentuk yang berbeda dengan organisasi regional EU atau European Union yang sudah bertransformasi menjadi organisasi supranasional[9], yang berarti negara-negara yang bergabung dengan organisasi tersebut menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada organisasi regional tersebut. Oleh karena itu, istilah organisasi supranasional dipergunakan, yang di mana kata supranasional berarti melewati negara atau di atas negara dan bangsa.

AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan sebuah daerah perdagangan bebas yang dibentuk pada tahun 1992 oleh ASEAN. Pada saat itu, negara anggota ASEAN hanya berjumlah enam: Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina[10]. Kemudian pada tahun 1995 sampai 1999, secara berturut-turut Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja bergabung ke ASEAN dan juga menjadi salah satu partisipan dari perdagangan bebas yang ditetapkan sebelumnya pada tahun 1992.

Perdagangan bebas yang ditetapkan pada 1992 tersebut merupakan salah satu usaha dari negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan serta memberdayakan perekonomian diawasannya dan juga untuk menyebarkan secara rata kekayaan serta nilai kemakmuran kepada 500 juta penduduk yang terdapat pada kawasan tersebut. Setelah terbentuknya perjanjian tersebut, maka para anggota sepakat untuk mengurangi atau meniadakan hambatan tarif dan non tarif kepada perdagangan dengan sesama negara anggota ASEAN. Namun di lain sisi, masing-masing negara diberikan hak untuk menentukan hambatan tarif dan juga non tarif kepada segala aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan negara yang bukan merupakan negara anggota ASEAN.

Kerjasama AFTA mencapai kemajuan pada tahun 2007. Pada saat itu, ASEAN membentuk sebuah piagam Singapura pada 20 November 2007[11]. Piagam tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas

dari kerjasama AFTA yang sudah digagas sebelumnya. Fungsi dari terbentuknya piagam tersebut adalah untuk mempermudah akses kerjasama yang mungkin dilakukan di pasar bebas ASEAN. Adanya piagam tersebut akan membuat negara-negara yang memutuskan untuk terlibat dalam sebuah kerjasama, menjadi lebih terikat. Di lain sisi, negara-negara anggota ASEAN yang ingin bekerjasama dengan negara anggota ASEAN lainnya akan diberikan kemudahan yang lebih daripada sebelumnya.

Indonesia merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Letak geografis Indonesia sendiri merupakan salah satu letak yang paling strategis di dunia. Karena letak geografis Indonesia yang diapit oleh benua Australia dan juga benua Asia, hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional[12]. Selain daripada hal tersebut, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah dan kebudayaan yang sangat luas dan banyak.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, mulai dari batu bara, gas alam, ikan di laut hingga cadangan minyak bumi yang berlimpah dan tanpa melupakan fakta bahwasannya Indonesia merupakan negara dengan hutan terluas di dunia, yang juga dijuluki sebagai negara paru-paru dunia. Hal tersebut menjadi potensi yang tidak sembarangan dimiliki oleh negara-negara di dunia.

Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara pendiri dari ASEAN[8] dan negara yang aktif berkontribusi dalam kemajuan organisasi ASEAN, terutama dalam Hal AFTA. Indonesia terlibat aktif dalam penandatanganan AFTA pada tahun 1992 tersebut. Namun di lain sisi, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Indonesia di lain sisi masih kekurangan sumber daya manusia untuk mengolah dan juga mengeksploitasi sumber daya alamnya untuk kepentingan nasionalnya. Ekspor yang dilakukan oleh Indonesia juga masih cenderung barang mentah yang diperlukan oleh industri-industri negara maju.

Oleh karena hal tersebut, adanya AFTA yang digagas pada tahun 1992 membawa kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam yang dimiliki agar dapat bersaing di pasar global dan menjadi negara dengan perekonomian top dunia. Di lain sisi, Indonesia harus belajar memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh AFTA dan juga harus dapat menjawab segala jenis tantangan yang mungkin terdapat pada daerah perdagangan bebas Asia Tenggara tersebut.

AFTA atau ASEAN Free Trade Area menjanjikan peluang yang beragam terutama bagi Indonesia. Peluang yang ditawarkan oleh AFTA sangat menguntungkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Ditambah lagi, memang salah satu tujuan AFTA adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar yang berskala global. Tahun 2015 menjadi momentum yang sangat krusial bagi AFTA, mengingat pada tahun tersebut AFTA akan diselenggarakan secara resmi dan Indonesia siap atau tidak siap, harus dapat memanfaatkan segala peluang yang terdapat dalam AFTA tersebut[13]. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Fakta tersebut menjadikan Indonesia negara dengan sejuta potensi yang dapat dikembangkan, terutama di pasar bebas ASEAN sendiri.

4.1. Analisis Peluang Indonesia dalam AFTA

Pada tahun 2015, AFTA sepakat untuk menghapus segala bea masuk dari perdagangan yang dilakukan di dalam wilayah Asia Tenggara terhadap negara Myanmar, Vietnam dan juga Kamboja. Sebelumnya pada tahun 2010 [14], biaya bea masuk untuk Indonesia, Thailand, Singapura dan lain sebagainya telah dihapuskan terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi pertanda baik dan perkembangan yang sangat mengesankan untuk kehidupan pasar bebas ASEAN baik di masa sekarang maupun di masa depan. Penghapusan hambatan tarif tersebut akan menjadi sebuah katalisator yang efektif bagi perkembangan ekonomi di wilayah Asia Tenggara.

Terdapat beberapa peluang yang ditawarkan AFTA seperti hal-hal yang akan dijelaskan berikut:

4.2. Pasar Terbuka

Pasar dapat diartikan sebagai pertemuan antara penjual dan pembeli dan di tempat tersebut, para penjual dan pembeli melakukan transaksi baik untuk membeli jasa maupun barang yang ditawarkan pada pasar tersebut. Pasar merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia sendiri. Adanya pasar tentu akan menggerakkan roda perekonomian di suatu negara. AFTA membuka sebuah peluang yang tidak dapat dilewatkan oleh Indonesia. Salah satunya adalah akses pasar yang semakin luas dan juga konsumen serta pembeli yang semakin beragam. Hal tersebut tentu diiringi dengan jumlah barang dan jasa yang semakin meningkat, karena pasar tidak hanya terbatas pada satu negara saja, melainkan seluruh negara yang terdapat di ASEAN.

Pasar yang semakin terbuka tentu akan meningkatkan pilihan konsumen yang terdapat dalam pasar tersebut. Para pembeli juga akan sangat mudah menemukan barang dan jasa dengan harga yang dirasa tepat untuk diri masing-masing dan kemudian dapat langsung melakukan transaksi dengan pihak penjual dari seluruh negara ASEAN. Hal tersebut tentunya akan menambah semangat dagang dan juga keinginan untuk selalu berinovasi agar dapat bertahan dari segala jenis persaingan yang ada.

4.3. Peningkatan Foreign Direct Investment

Investasi Asing atau FDI merupakan salah satu jenis investasi yang berasal dari luar negeri atau pihak asing yang ditanamkan langsung kepada sektor-sektor ekonomi tertentu yang diperkirakan dapat menghasilkan keuntungan baik bagi pihak dalam negeri maupun luar negeri. Investasi tersebut merupakan investasi yang bersifat langsung dan bukan berupa bursa saham atau surat obligasi.

Investasi merupakan salah satu unsur yang krusial dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Adanya investasi asing yang semakin dipermudah memasuki suatu negara maka akan berdampak baik pada ekonomi suatu negara tersebut. Orang-orang yang dulunya tidak memiliki pekerjaan, akan dapat memiliki pekerjaan untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Selain dapat mengurangi angka pengangguran, FDI juga dapat mengoptimalkan pembangunan fasilitas umum yang dipergunakan oleh khalayak banyak.

Dibukanya AFTA menjadi salah satu peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan arus FDI ke negaranya. Hal tersebut menjadi salah satu peluang yang vital bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonominya di tengah perubahan zaman yang dinamis. Hal tersebut tentu dibuktikan dengan data grafis berikut:

FDI di lima negara ASEAN: Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura mengalami kenaikan yang signifikan terutama sebelum tahun 2015, di mana tahun yang menjadi babak baru bagi AFTA. FDI yang menjadi primadona di negara-negara ASEAN adalah terdapat pada bidang jasa, pertanian, manufaktur, konstruksi dan juga pertambangan. Hal tersebut secara eksplisit menjelaskan peluang yang ditimbulkan oleh pembukaan AFTA atau Pasar Bebas Asia Tenggara pada tahun 2010 terutama pada FDI. Selain berpengaruh kepada sektor dalam negeri, adanya FDI akan mempermudah akses transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Teknologi yang mutakhir tersebut sangat diperlukan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan kualitas industri dalam negerinya agar dapat bersaing secara global. Selain menawarkan peluang bagi Indonesia, kehadiran



Figure 1: Peningkatan perdagangan di berbagai sektor strategis Indonesia

AFTA juga menawarkan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Tantangan tersebut dapat berupa perbedaan sumber daya manusia, konflik dengan negara-negara tertentu dan lain sebagainya. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai tantangan yang dihadapi AFTA dan khususnya Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota dari AFTA. Berikut tantangan-tantangan baik bagi AFTA maupun Indonesia: Tantangan Perang Dagang Perang dagang merupakan sebuah peristiwa konflik dalam bidang ekonomi yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan masing-masing negara menaikkan hambatan tarif dan non-tarif terhadap produk impor maupun ekspor[17]. Perang dagang merupakan perang yang dilaksanakan untuk saling menjatuhkan ekonomi dari negara lawan. Hambatan tarif dan non tarif dinaikkan sedemikian rupa untuk mempersulit atau meniadakan produk impor dari negara lawan. Kemudian negara pemenang akan memaksa negara lawan untuk mengikuti keinginannya dengan melakukan beberapa perjanjian yang terikat. Perang dagang tidak hanya mempengaruhi keadaan ekonomi antara negara-negara yang terlibat dalam konflik perang dagang tersebut. Tindakan tersebut tentu mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia, seperti konflik dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Amerika Serikat menuduh Cina telah melakukan spionase terhadap produk Amerika Serikat dan berupaya mencontoh produk tersebut dengan mengirim seorang mata-mata ke Amerika Serikat. Hal tersebut kemudian yang memicu perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia tersebut. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina sangat berefek kepada ASEAN khususnya AFTA sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh sebuah fakta bahwasannya Cina merupakan mitra dagang eksklusif Asia Tenggara. Bahkan pada tahun 2005, Cina dan Asia Tenggara telah membentuk suatu daerah perdagangan bebas yang berhasil membuat kesepakatan untuk mengeliminasi 90Presensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian ASEAN sendiri. ASEAN diprediksi akan mengalami pengurangan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.1 % setiap 10 % Amerika Serikat mengurangi eksportnya ke Cina. Produk-produk yang berasal dari Amerika Serikat dan juga Cina memenuhi sekitar 20 % dari total produk yang terdapat di AFTA. Adanya perang dagang antara kedua negara tersebut akan berpengaruh terhadap stagnasi di kawasan ASEAN. Adanya stagnasi tersebut akan berimbas kepada permintaan produk yang semakin tinggi, namun hal tersebut tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan produk dari kedua negara tersebut. Efek perang dagang kepada Indonesia sendiri tidak terlalu signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut dijelaskan oleh Sri Mulyani selaku menteri keuangan[20]. Beliau mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat partisipasi yang rendah terhadap ekonomi global. Fakta tersebut menjadi sebuah tameng yang melindungi Indonesia dari perang dagang tersebut. Sri Mulyani juga menambahkan bahwa semakin suatu negara tergantung terhadap perekonomian global dan semakin partisipasinya tinggi, maka efek yang ditimbulkan dari konflik ekonomi antara dua kekuatan ekonomi dunia tersebut, akan semakin masif. Terlepas dari fakta tersebut, Indonesia harus selalu bersiap-siap akan segala kemungkinan yang terjadi di masa depan, terutama yang terkait dengan kabar perkembangan dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, mengingat ASEAN merupakan wilayah yang sangat bergantung kepada Cina, yang pada akhirnya dapat dikatakan secara tidak langsung, perang dagang akan mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Adanya perang dagang tersebut mengajarkan kepada ASEAN dan juga Indonesia untuk lebih cerdas lagi dalam usahanya untuk mempertahankan keadaan ekonominya di tengah perubahan-perubahan yang terjadi secara tiba-tiba.

4.4. Tantangan di Tengah Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan salah satu peristiwa penyebaran penyakit di mana penyebaran tersebut sudah tidak dapat dikendalikan lagi dan sudah menjadi masalah dunia internasional[21]. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu pandemi terbesar di dunia di mana menurut data pada 23 April 2020, virus tersebut telah menginfeksi setidaknya 2.3 juta orang di seluruh dunia [21]. Virus ini awalnya berasal dari Cina dan kemudian pada Maret 2020, WHO menyatakan keadaan pandemi di seluruh dunia[22].

Pandemi merupakan salah satu ancaman yang sangat besar dan tidak dapat disepelekan. Pandemi tersebut telah merenggut ratusan ribu nyawa orang dan sangat berefek kepada perkembangan ekonomi yang ada di negara-negara yang ada di dunia. Banyak negara mengalami resesi ekonomi yang sangat masif akibat adanya kontraksi berkali-kali selama kurun waktu setahun ini. Namun di balik kehadiran pandemi Covid-19 tersebut, terdapat sebuah tantangan dan peluang. Tantangan tersebut tentunya setiap individu harus mematuhi protokol Kesehatan yang ada agar dapat mempersempit ruang penyebaran infeksi dari virus Covid-19 dengan mempraktikkan protokol Kesehatan oleh pemerintah. Peluang dari adanya pandemic Covid-19 adalah bahwasannya kegiatan ekonomi tidak dapat lagi dilakukan secara langsung atau tatap muka, seperti pertemuan antara pembeli dan penjual di pasar seperti yang sebelumnya dilakukan sebelum adanya pandemi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi di seluruh negara ASEAN juga mengalami distorsi yang besar, sehingga bahkan menyebabkan resesi ekonomi. Tercatat bahwasannya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020 mencapai angka -5.32 %[23]. Angka pertumbuhan tersebut lebih dalam dari apa yang diprediksi oleh Sri Mulyani selaku menteri keuangan Indonesia.

Malaysia sendiri merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara yang juga terkena imbas dari pandemic Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada kuartal pertama 2020 hanya berada pada angka 0,7 %[23]. Bahkan disebutkan perekonomian Malaysia terkontraksi hingga menjadi -17,1 %, yang merupakan angka terbesar dan terendah semenjak krisis Asia yang menimpa negara tersebut pada tahun 1998. Hal tersebut secara umum disebabkan oleh ekspor Malaysia yang mengalami hambatan akibat pandemi Covid-19, yang memaksa Sebagian besar produsen untuk tidak memproduksi barang dan jasa atau bahkan gulung tikar. Selain daripada Malaysia, Singapura juga mengalami resesi ekonomi. Singapura sendiri merupakan negara kota yang kegiatan ekonominya mengandalkan pasar dan keuangan internasional. Oleh karena hal tersebut, di saat pasar internasional jatuh akibat pandemi Covid-19, Singapura juga ikut jatuh. Singapura sendiri memang sudah memasuki resesi pada kuartal awal tahun 2020 dan kemudian pada kuartal II 2020, perekonomian Singapura turun menjadi -0,3%. Filipina juga menjadi negara dengan tingkat resesi terbesar se-Asia Tenggara. Hal tersebut tentu dipengaruhi dengan kebijakan Lockdown yang diterapkan di negara tersebut guna melawan penyebaran Pandemi Covid-19 yang mewabah di negerinya. Akibat dari Lockdown tersebut, Filipina harus menanggung resesi sebanyak 22 %[23] Filipina sendiri saat ini memiliki 292 ribu kasus infeksi Corona dan merupakan negara dengan jumlah individu yang terinfeksi yang paling banyak di Asia Tenggara. Namun angka individu yang berhasil sembuh dari pandemi Covid-19 mencapai angka 231 Ribu dan jumlah kematian yang mencapai angka 5000. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa pemerintah Filipina melakukan Lockdown terhadap negaranya, walaupun terdapat risiko yang besar, yaitu resesi ekonomi, yang sudah dijelaskan sebelumnya.



pic2.png

Figure 2: Caption

5. KESIMPULAN

AFTA merupakan sebuah daerah perdagangan bebas yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. AFTA dibentuk awalnya pada tahun 1992. AFTA merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh negara ASEAN untuk meningkatkan dan memajukan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN agar dapat bersaing secara global. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN dan juga pendiri AFTA. Terdapat berbagai peluang yang ditawarkan oleh AFTA, seperti keberadaan investasi asing yang semakin mudah, adanya pasar yang semakin luas dan lain sebagainya. Namun AFTA juga membawa tantangan tersendiri baik bagi Indonesia maupun negara ASEAN, seperti pandemi Covid-19 dan Perang Dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Namun dari semua tantangan dan peluang yang ada, pemerintah Indonesia harus dapat memanfaatkan hal tersebut secara seimbang dan berkesinambungan agar dapat memenuhi tuntutan nasional sendiri.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

7. KONTRIBUSI PENULIS

8. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. S. McGlinchey, R. Walters, and C. Scheinflug, "Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional," *E-International Relations Publ.*, vol. 110, no. 9, pp. 1689–1699, 2017.
2. Jackson. Robert and Sorensen. George, *Intro to IR: Theories and Approach*, Fifth edit. Oxford: Oxford University Press, 2013.
3. R. P. CLAUDE and M. CAIN, *International Relations and Politics*, vol. 504, no. 1. 1989.
4. A. R. Dariah, "Perdagangan Bebas: Idealisme dan realitas," *Mimb. J. Sos. dan Pembang.*, vol. 21, no. 1, pp. 115–126, 2005, [Online]. Available: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/issue/view/28>.
5. A. Smith, "The Wealth of Nations 1723-1790," p. 1281, 1925, [Online]. Available: <http://iucat.iu.edu/catalog/14634594>.
6. P. H. Purwandono, "PROSPEK PEMBENTUKAN ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS(AICHR)(Harapan Baru, Kelemahan dan Solusi)," *J. Yust.*, vol. 1, no. 2, p. 634, 2012, [Online]. Available: <https://www.google.com/url?sa=trct=jq=esrc=ssource=webcd=ved=2ahUKEwjePC2g5BZgQFjAEegQICChACurl=https>
6. detiktravel, "Profil Negara ASEAN Terlengkap: Jumlah Penduduk dan Luasnya," travel.detik.com, 2020. <https://travel.detik.com/travel-news/d-5088612/profil-negara-asean-terlengkap-jumlah-penduduk-dan-luasnya> (accessed Jan. 13, 2021).

7. B. Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan, Third edit. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
8. P. Immanuel and Wahyudi, Sejarah Uni Eropa: Mendedah Masa Lalu dan Isu Terkini, First edit. Yogyakarta: Azka Presindo, 2016.
9. S. Sukmana, "Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area)," *Palar | Pakuan Law Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 103–120, 2019, doi: 10.33751/v5i2.1188.
10. M. Kadarisman, "Analisis Kepentingan Indonesia Dalam Meratifikasi Piagam Asean (Asean Charter)," *Sociae Polites*, vol. 15, no. 1, pp. 1–22, 2017, doi: 10.33541/sp.v15i1.437.
11. dickson, "Profil Negara Indonesia," *ilmu pengetahuan umum.com*, 2019. <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-indonesia/> (accessed Jan. 13, 2021).
12. R. Syahril, K. Ulum, and Rani, "Strategi Dan Tantangan Menghadapi Asean Free Trade Area (Afta) 2015," *Semin. Nas. Inov. dan Tren*, p. 84, 2015.
13. R. O. Mandagie, "AFTA 2015; Perdagangan Bebas dan Kesiapan SDM Indonesia," <http://disperindag.kalbarprov.go.id>, 2015. <http://disperindag.kalbarprov.go.id/berita/afta-2015-perdagangan-bebas-dan-kesiapan-sdm-indon.htmlgsc.tab=0> (accessed Jan. 13, 2021).
14. R. Kurniawan, "PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DUMAI PASCA BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN," *J. Ilmu Hub. Int.*, vol. 4, no. 2, pp. 211–222, 2017, doi: 10.15373/22778179/apr 2013/61.
15. I. Ilhamdi, R. Oktaviani, and Y. L. Purnama Dewi, "Pengaruh Foreign Direct Investment Dan Afta Terhadap Kesempatan Kerja Sektoral Di Asean 5," *J. Ekon. Dan Kebijak. Pembang.*, vol. 4, no. 2, pp. 140–152, 2018, doi: 10.29244/jekp.4.2.140-152.
16. Wartaekonomi, "Apa itu Perang Dagang AS-Cina?," www.wartaekonomi.co.id, 2019. <https://www.wartaekonomi.co.id/re-itu-perang-dagang-as-china> (accessed Jan. 13, 2021).
17. D. Shira, "ASEAN's Free Trade Agreements: An Overview," www.aseanbriefing.com, 2017. <https://www.aseanbriefing.com/news/aseans-free-trade-agreements-an-overview/> (accessed Jan. 13, 2021).
18. M. N. Al Syahrin, "China Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di Kawasan Asia Pasifik," *J. Glob. Strateg.*, vol. 12, no. 1, p. 145, 2018, doi: 10.20473/jgs.12.1.2018.145-163.